

Siaran Pers

STUNTING SUMMIT: KOMITMEN BERSAMA TURUNKAN PREVALENSI STUNTING DI INDONESIA

Jakarta, 28 Maret 2018 – Dalam rangka meningkatkan komitmen dan kapasitas daerah serta para pemangku kepentingan dalam merencanakan dan melaksanakan intervensi penurunan *stunting* terintegrasi di kabupaten/kota, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan acara **Stunting Summit** yang mengusung tema **“Bersama Cegah Stunting”** pada 28 Maret 2018, di Hotel Borobudur, Jakarta. Tema ini dipilih karena Kementerian PPN/Bappenas berpandangan bahwa penanganan masalah *stunting* di Indonesia harus dilakukan dengan pendekatan multi-sektor, yaitu melibatkan 17 Kementerian/Lembaga (K/L) teknis dan satu Kementerian Koordinator, serta bekerjasama dengan para pemangku kepentingan pembangunan, antara lain pemerintah daerah, dunia usaha, kelompok masyarakat madani, organisasi profesi dan akademisi, mitra pembangunan, serta media massa. Dihadiri 34 gubernur seluruh Indonesia, 100 bupati/walikota lokasi prioritas penurunan *stunting*, 33 bupati lokasi Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat (PKGBM), serta 100 kepala desa, dengan jumlah keseluruhan peserta *Stunting Summit* sebanyak 1.000 orang.

Dalam laporannya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan apabila terus dibiarkan *stunting* dapat merugikan ekonomi Indonesia. “*Stunting* dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara sebesar 2-3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) per tahun. Jika PDB negara kita Rp 13.000 triliun pada 2017, maka diperkirakan potensi kerugian akibat *stunting* dapat mencapai Rp 300 triliun per tahun,” jelas Menteri Bambang. Untuk itu, Menteri Bambang mengajak para kepala daerah didukung pemangku kepentingan pembangunan lainnya untuk berinvestasi dalam menurunkan angka *stunting* karena berpotensi dapat mencapai keuntungan 48 kali lipat. “Melalui *Stunting Summit* ini, pemerintah berharap dapat menggalang komitmen kepala daerah, serta meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan dengan bersama-sama mencegah dan menurunkan prevalensi *stunting* di Indonesia,” ujar beliau.

Stunting Summit merupakan pertemuan nasional yang diselenggarakan untuk pertama kalinya di Indonesia dalam rangka mendorong percepatan penurunan *stunting* di Indonesia. *Stunting Summit* menjadi momentum bagi pemerintah Indonesia untuk mencanangkan intervensi penurunan *stunting* terintegrasi di kabupaten/kota prioritas, dan memperluas lokasi intervensi secara bertahap. “Sebagai tindak lanjut arahan Bapak Presiden mengenai pentingnya mengatasi masalah *stunting* yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 16 Agustus 2017 tentang RAPBN 2018, pemerintah melaksanakan intervensi penurunan *stunting* terintegrasi yang difokuskan pada 100 kabupaten/kota pada 2018. Direncanakan, kegiatan ini diperluas mencakup 160 kabupaten/kota pada 2019, dengan menambahkan 60 kabupaten/kota terutama kabupaten-kabupaten di provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur,” jelas Menteri Bambang.

Stunting Summit juga sebagai forum bertukar pengalaman bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan yang memiliki cerita sukses (*success stories*) dan praktek baik (*best practices*) dalam kegiatan penurunan *stunting* di daerah. Praktek baik dari kabupaten dipaparkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sintang Kalimantan Barat, dari dunia usaha dipresentasikan oleh *SUN Business Network* Indonesia, dari organisasi masyarakat diwakili Ketua PP Fatayat NU dan NA Muhammadiyah, sementara dari mitra pembangunan disampaikan oleh *Nutrition Specialist* UNICEF. “Agenda pertemuan yang dimulai sejak pagi tadi menampilkan praktek baik penurunan *stunting* dari beberapa daerah yang dapat dijadikan pembelajaran untuk diadopsi atau direplikasi di daerah lainnya. Selain itu, K/L juga menyampaikan berbagai kegiatan untuk mendukung upaya penurunan *stunting* yang dapat disinkronkan dengan kegiatan daerah,” kata Menteri Bambang.

Stunting Summit menampilkan *talkshow* menteri terkait dengan topik “Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi”, yaitu: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Pada sesi akhir acara ini, juga akan dilakukan **Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi** antara pemerintah pusat dan daerah.

Stunting atau **anak kerdil** adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Dalam jangka pendek, kekurangan gizi akan menyebabkan gangguan kecerdasan, tidak optimalnya ukuran fisik tubuh, serta gangguan metabolisme. Dalam jangka panjang, kekurangan gizi menyebabkan menurunnya kapasitas intelektual yang akan berpengaruh pada produktivitas saat dewasa, serta meningkatkan risiko penyakit tidak menular, seperti diabetes melitus, hipertensi, jantung koroner, dan stroke. Saat ini, satu dari tiga anak balita di Indonesia menderita *stunting*. Menimbang dampak *stunting* sangat berpengaruh terhadap kualitas SDM dan perkembangan ekonomi suatu negara, pemerintah Indonesia telah menjadikan upaya penurunan *stunting* sebagai solusi sekaligus investasi untuk menghasilkan SDM Indonesia yang berdaya saing. Dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah telah menargetkan penurunan *stunting* pada anak usia di bawah dua tahun (Baduta) dari 32,9 persen di 2013 menjadi 28 persen di 2019, sementara di dalam RKP 2018 pemerintah telah menjadikan penurunan *stunting* sebagai salah satu Proyek Prioritas Nasional. Dengan komitmen seperti itu, diharapkan SDM Indonesia mampu bersaing di era ekonomi digital yang memerlukan penguasaan teknologi dan *skill* yang tinggi, serta memutus rantai kemiskinan antar-generasi.

Dalam pelaksanaannya, percepatan penurunan *stunting* tidak dapat diselesaikan sendiri oleh sektor kesehatan, melainkan harus dilakukan secara bersama-sama melalui penguatan komitmen daerah serta koordinasi lintas sektor dan lintas K/L. “Komitmen pemerintah daerah sangat penting dalam memastikan program penurunan *stunting* dan perlu direncanakan dan dianggarkan di dalam dokumen perencanaan di daerah. Untuk itu, kepala daerah harus turun tangan mengawal dan memantau pelaksanaan setiap kegiatan penurunan *stunting* di daerah masing-masing agar berjalan dengan baik dan tepat sasaran,” jelas Menteri Bambang. Sebagai contoh, untuk memastikan praktek pengasuhan yang baik, Kementerian Kesehatan berperan menyediakan layanan kesehatan bagi ibu hamil, remaja dan anak, serta pendidikan gizi dan pemberdayaan masyarakat. Untuk meningkatkan akses keluarga terhadap makanan bergizi membutuhkan dua instansi. Kementerian Pertanian berperan mengembangkan kebun keluarga dan pemberian bibit ternak kepada keluarga, sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan berperan menggalakan pembuatan kolam ikan dan memasyarakatkan gemar makan ikan. Untuk meningkatkan akses masyarakat ke air bersih dan sanitasi, peran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga dibutuhkan. Di tingkat daerah, aparat desa diharapkan dapat berperan menggali potensi lokal untuk mendorong perbaikan gizi melalui pemberdayaan masyarakat setempat, dan yang tidak kalah penting dan menjadi kunci keberhasilan penurunan *stunting* adalah masyarakat itu sendiri, yaitu dengan cara memiliki kesadaran dan berperilaku hidup sehat serta pola makan gizi seimbang.

Jakarta, 28 Maret 2018

Thohir Afandi
Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan
Kementerian PPN/Bappenas

Untuk informasi lebih lanjut:
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310
Telepon: (021) 31936207, 3905650
Faksimile: (021) 31901154
Email: humas@bappenas.go.id